



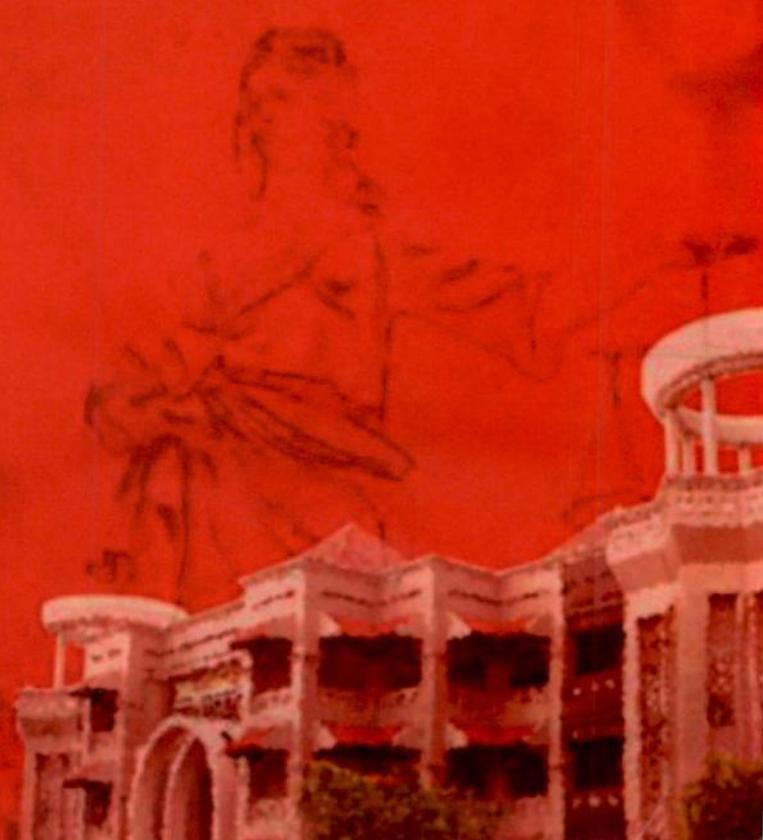
**Proceeding**

# **SEMINAR NASIONAL**

**PELUANG DAN TANTANGAN  
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015  
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL  
**MEDIA  
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**  
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

**KATA PENGANTAR**

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
<b>Hikmahanto Juwana</b> .....	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
<b>Mukti Fajar ND</b> .....	11
<b>BIDANG I: POLITIK HUKUM</b>	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
<b>Rochmani</b> .....	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
<b>Ane Permatasari</b> .....	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
<b>Khaidir Anwar dan Eddy Rifai</b> .....	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
<b>Septi Nur Wijayanti</b> .....	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
<b>Rofi Aulia Rahman</b> .....	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
<b>Fadia Fitriyanti, Andika Putra</b> .....	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
<b>Magdariza</b> .....	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Dewi Nurul Musjtari</b> .....	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL <b>Yeni Widowaty</b> .....	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA <b>Ferdi</b> .....	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA <b>Naya Amin Zaini</b> .....	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Nanik Prasetyoningsih</b> .....	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG <b>Tanto Lailam</b> .....	191
<b>BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN</b>		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA <b>FX. Sumarja</b> .....	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING <b>Djoko Imbawani Atmadjaja</b> .....	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN <b>Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah</b> .....	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN <b>Delfiyanti</b> .....	241

**BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Eko Suwarni**..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA  
**Noer Indriati**..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA  
**Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid**..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*  
**Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso**..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN  
**Shinta Agustina**..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT  
**Indien Winarwati**..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Zulfikar Jayakusuma**..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian**..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Siti Nurhayati**..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ( <i>PROCUREMENT</i> ) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	<b>Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake</b> .....	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	<b>Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo</b> .....	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	<b>Reaza Rahmatika</b> .....	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	<b>Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni</b> .....	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> ( <i>TRANSFORMASI JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	<b>Qur'ani Dewi Kusumawardani</b> .....	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	<b>Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto</b> .....	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	<b>Martino Sardi</b> .....	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	<b>Masrullah, Murdian Munandar</b> .....	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	<b>Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu</b> .....	473

# **PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI**

**Siti As'adah Hijriwati**

e-mail: sitiasadahhijriwati@gmail.com

**Achmad Soeharto**

e-mail: suharto\_nikal@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

## **ABSTRAK**

Penguatan Karakter dan moral bangsa sangat diperlukan dalam rangka menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Karakter dan Moral yang tangguh sangat mendukung kesiapan menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), MEA merupakan era perdagangan tanpa campur tangan negara, disanalah akan terjadi liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Sebagai bangsa yang berada di kawasan ASEAN, Indonesia harus siap dan mempersiapkan seluruh masyarakatnya. Persiapan yang harus dilakukan diantaranya dengan membentuk karakter dan moral bangsa yang kuat dan tangguh. Karakter dan moral yang kuat dan tangguh akan berpengaruh pada sikap masyarakat dalam mentaati aturan dalam pergaulan dan juga perdagangan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji seberapa jauh pengaruh karakter dan moral yang tangguh dalam membentuk sikap masyarakat anti plagiasi. Penguatan karakter dan moral bangsa diantaranya dapat dilakukan melalui pembentukan budaya anti plagiasi. Budaya anti plagiasi membentuk sikap masyarakat untuk tidak asal jiplak dalam praktek perdagangan baik barang ataupun jasa. Menjiplak karya orang lain/plagiasi adalah tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hukum/hak cipta orang lain. Hak cipta merupakan kekayaan yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum, sehingga jika akan memanfaatkan harus mendapat ijin penciptanya. Masyarakat dari bangsa yang berkarakter dan bermoral tangguh akan memahaminya sehingga tidak akan melanggar hak cipta dalam kegiatan perdagangan dan lainnya. Plagiasi /menjiplak

karya orang lain tidak hanya dalam dunia perdagangan barang, namun juga dalam perdagangan jasa, termasuk dalam menulis karya ilmiah. Untuk menumbuhkan budaya anti plagiasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, yang merupakan usaha preventif mencegah plagiasi dalam dunia perdagangan dan lainnya, seperti melalui pendidikan anak usia dini, anak remaja, maupun membiasakan masyarakat untuk kreatif dan percaya pada diri sendiri. Selain itu dapat juga dilakukan cara represif untuk memberikan efek jera yaitu dengan penerapan sanksi pelanggaran secara berkeadilan

## PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN, artinya ada sebuah sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Kehadiran MEA diawali pada saat KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Desember 1997 silam. Pada saat itu para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang. Pada KTT ASEAN di Bali bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN mendeklarasikan bahwa MEA merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (*Bali concord II*) pada tahun 2020. Selain MEA, komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2020. Selanjutnya pada pertemuan ke-38 menteri ekonomi ASEAN Agustus 2006 telah disepakati penyusunan "cetak biru MEA". (<http://pphp.pertanian.go.id/news/313sejarah>) Cetak biru MEA merupakan rencana induk yang koheren yang mengarahkan pembentukan MEA, mengidentifikasi karakteristik dan elemen MEA dengan target dan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan berbagai tindakan serta fleksibilitas yang disepakati untuk mengakomodasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. (Kementerian Perdagangan:2011; Informasi Umum MEA)

Dalam informasi Umum juga disebutkan bahwa MEA memiliki karakteristik utama yaitu: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan perdagangan ekonomi yang merata dan kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Pasar tunggal dan basis produksi terdiri atas lima elemen inti, yaitu arus barang yang bebas, arus jasa yang bebas, arus investasi yang bebas, arus modal yang bebas dan arus tenaga terampil yang bebas. Kawasan ekonomi yang berdaya saing, didalamnya terdapat enam elemen inti, yaitu kebijakan persaingan, perlindungan konsumen. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pembangunan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*. Pada karakteristik pembangunan

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

ekonomi yang merata terdapat dua elemen utama yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan inisiatif untuk integrasi ASEAN. Karakteristik keempat adalah integrasi dengan ekonomi global. Untuk itu dilakukan pendekatan koheren menuju hubungan ekonomi eksternal melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Area/FTA*) dan kemitraan ekonomi yang lebih erat (*Closer Economic Partnership/CEP*) dan pendekatan partisipasi yang lebih kuat dalam jejaring pasokan global.

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN membawa konsekuensi bagi seluruh negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Menteri Perindustrian MS Hidayat di harian Suara Karya (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/9599>) menyebut MEA 2015 merupakan momen penting bagi Indonesia, karena berpotensi memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional, namun di sisi lain juga akan menjadi tantangan, mengingat jumlah penduduk Indonesia sangat besar tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya.

Menurut Arya Baskara (<http://crmsindonesia.org/node/624>), bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008 dalam Arya Baskara: <http://crmsindonesia.org/node/624>). Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Selanjutnya Arya Baskara menyebut dengan hadirnya MEA, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para *risk professional* diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial(hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun 2015 mendatang. Peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia harus disikapi dengan persiapan dan pembentukan karakter bangsa yang tangguh. Karakter berasal dari bahasa Inggris *character*, yang

berarti watak atau sifat. (Nyoman Sadra Dharmawan, 2014 :2) Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat atau berwatak. Dengan makna seperti itu berarti karakter identik dengan kepribadian dan akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. (Koesoema, 2007 dalam Nyoman Sadra Dharmawan 2014)

Karakter bangsa yang baik tercermin pada perilaku sehari-hari masyarakat bangsa itu secara keseluruhan, misalnya dalam pergaulan antar individu, antara individu dengan pemerintahan secara lokal, nasional maupun internasional. Cerminan perilaku tersebut dapat dilihat dari budaya hukum masyarakatnya, termasuk budaya untuk menghargai hasil karya orang lain dan tidak menjiplak karya tersebut demi kepentingannya sendiri.

## **METODE**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan "*socio legal research*". Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil penelitian dan pemikiran para pakar. Validasi data menggunakan teknik triangulasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Penguatan Karakter Bangsa**

Karakter suatu bangsa merupakan aspek penting yang mempengaruhi perkembangan sosial-ekonomi bangsa. Kualitas karakter yang tinggi dari masyarakatnya akan menumbuhkan kualitas bangsa tersebut. Beberapa ahli berkeyakinan bahwa pengembangan karakter yang terbaik adalah jika dimulai sejak usia dini. ( Nyoman Sadra Dharmawan, 2014:4) Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa menyebutkan bahwa karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila,

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen terhadap NKRI. (Pemerintah RI, 2010)

Karakter bangsa yang kuat akan terbentuk melalui pendidikan, baik formal, non formal maupun informal yang saling melengkapi. Pendidikan karakter menurut Lickona mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*) dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Selain itu Frye, 2002 mendefinisikan pendidikan karakter sebagai, “*a national movement creating schools that foster ethical, responsible, and caring young people by modeling and teaching good character through an emphasis on universal values that we all share.*” (Marzuki, 2012)

Menurut Lickona (1992 dalam Suyatno, 2010), pendidikan karakter diperlukan karena : (1) Banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral, (2) Memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama, (3) Peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orang tua, masyarakat atau lembaga keagamaan, (4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat dan tanggung jawab (5) demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral, karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk dan oleh masyarakat, (6) tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai, sementara sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain maupun tanpa desain, (7) komitmen pada pendidikan karakter penting, manakala kita mau dan terus menjadi guru yang baik, dan (8) Pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang meningkat.

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi persoalan masa depan yang semakin kompleks seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggung jawab, rendahnya kepercayaan diri dan lain-lain. Selanjutnya Lickona dalam Elkind dan Sweet dalam Suyatno (2010) menggagas pandangan bahwa pendidikan karakter adalah upaya terencana untuk membantu orang untuk memahami, peduli dan bertindak atas nilai-nilai etika/moral. Pendidikan karakter ini mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat yang membantu orang hidup dan bekerja bersama-sama sebagai keluarga, teman, tetangga, masyarakat dan bangsa.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Dalam kebijakn pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-20125 ditegaskan bahwa karakter merupakan hasil keterpaduan empat bagian, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga dan

olah rasa dan karsa. Olah hati teerkait dengan perasaan sikap dan keyakinan/keilmuan, olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif dan inovatif, olah raga terkait dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas, serta olah rasa dan karsa berhubungan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan dan penciptaan kebaruan. (Pemerintah RI, 2010: 21 dalam Marzuki)

Nilai-nilai karakter yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila pada masing-masing bagian tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Karakter yang bersumber dari olah hati antara lain beriman dan bertaqwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban dan berjiwa patriotik;
- b. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks dan reflektif;
- c. Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestetika antara lain bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria dan gigih, dan
- d. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras dan beretos kerja.

Dari nilai-nilai karakter di atas, Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud) mencanangkan empat nilai karakter utama yang menjadi ujung tombak penerapan karakter di kalangan peserta didik di sekolah, yakni jujur, cerdas, tangguh dan peduli.

2. Budaya anti plagiasi sebagai bentuk kualitas karakter yang tinggi.

*Black's law Dictionary*, seperti di kutip oleh Henry Soelistyo (2011), mendefinisikan plagiasi sebagai:

*"The deliberate and knowing presentation of another person's original ideas or kreative expression as one's own. Genarally plagiarism is immoral but not illegal. If the expression's creator gives unrestricted permission for its use and the user clai the expression as original, the user commits plagiarism but does not violate copyright laws. If the original expresssion is coppied without permission, the plagiarsm may violate copyright laws, even if credit goes to the creator. And if the plagiarsm result in material gain, it may be deemed a passing of activity that violate the Lanham Act."*

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Definisi dari kamus tersebut membedakan antara tindakan *immoral* dan *illegal*. Namun yang pasti, apabila yang diplagiasi merupakan *original creative expression*, maka plagiat itu dianggap melanggar UU hak Cipta. Sementara itu, penilaian bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran Hak Cipta juga secara tegas dinyatakan oleh *the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, dalam *glossary* tahun 1980, sebagai berikut:

*“Generally understood as the act offering or presenting as one’s own the work of another, wholly or partly, in a more or less altered form or context. The person so doing is called a plagiarist; he is guilty of deception and, in the cash of works protected by copyright, also of infringement of copyright”.*

Definisi WIPO menekankan satu syarat normatif, bahwa pelanggaran Hak Cipta terjadi bila ciptaan yang diplagiat merupakan karya yang dilindungi Hak Cipta. Persyaratan ini secara implisit mengindikasikan norma sebaliknya apabila karya yang diplagiat merupakan ciptaan *public domain*, maka plagiarisme yang dilakukan itu bukan merupakan tindakan pelanggaran Hak Cipta.

Melihat definisi plagiarisme di atas, jelas bahwa aspek moral dan etika sangat berperan karena perilaku mendaku karya orang lain. Dewasa ini sangat terlihat penurunan moral dan etika masyarakat Indonesia, terlebih di kalangan akademik dengan banyak terjadinya kasus plagiarisme. Sebuah tulisan membahas tentang Epidemi Plagiarisme karya Janianto Damanik seperti dikutip oleh Henry Soelistyo (2011), Janianto telah mengobservasi permasalahan plagiarisme dan menemukan tiga penyebab, yaitu:

- a. Makin meluasnya mentalitas menerobos di kalangan masyarakat, termasuk mereka yang berstatus mahasiswa. Mereka lebih suka menempuh jalan pintas, yang berorientasi pada hasil dan bukan proses. *Fighting spirit* untuk menjalani proses pendidikan berikut tantangan-tantangannya, kian menipis. Sejalan dengan itu plagiarisme pun ditempuh dan bukan merupakan hal yang tabu kalau harus membeli skripsi pesanan, sebagai jalan pintas menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar.
- b. Menebalnya budaya *simulacra* atau ilusif/keseolah-olahan, karena masyarakat terjangkit sindrom megalomania, yaitu semangat pantang tidak tampil hebat, termasuk mengejar sederetan gelar akademik sekedar untuk *prestige*. Ini banyak menjangkiti dosen-dosen muda yang kurang percaya diri. Sayangnya yang kemudian dilakukan adalah membuat karya ilmiah sebanyak-banyaknya, meski padat dengan kutipan plagiat yang jelas-jelas milik orang lain. Penjiplakan, peniruan dan kanibalisme karya tulis menjadi jalan singkat pemenuhan publikasi ilmiah. Semua ditempuh, meski mereka tahu itu penuh bumbu-bumbu palsu dan menipu.
- c. Minimnya sanksi hukum terhadap pelaku plagiarisme.  
Penerapan sanksi hukum memang harus dilakukan secara tegas, apalagi dilakukan oleh kalangan akademik. Armada Riyanto dalam Henry Soelistyo (2011) menyatakan “plagiarisme adalah tindakan pencurian kreativitas intelektual. Semetara itu maraknya plagiarisme diakui sebagai dampak dari rusaknya bangunan nurani kejujuran seiring

dengan meredupnya cita rasa kreatif, ilmiah dan miskinnya pergumulan paradigmatik di kalangan dosen dan mahasiswa. Untuk itu perlu diterapkan sanksi hukum yang tepat dan terukur terhadap tindak plagiarisme.

Plagiarisme merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak bermoral, jadi harus dihilangkan dari kebiasaan masyarakat, terutama kalangan akademis. Sanksi hukum saja tentu tidak cukup jika tidak disertai dengan perbaikan moral dan etika serta budaya hukum. Sebaik apapun hukum yang dibuat, tapi pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum adalah sikap-sikap masyarakat, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Semua komponen budaya hukum itulah yang sangat menentukan berhasil tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum. (Esmi Warrasih, 2005:96)

Perbaikan moral, etika dan budaya anti plagiarisme harus dilakukan sejak dini, sejak masyarakat masih menjadi anak-anak, melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan dilakukan sepanjang hayat. Konsistensi terhadap hal ini akan membuahkan masyarakat yang mempunyai budaya anti plagiasi, tidak hanya dikalangan akademis tapi juga pada seluruh masyarakat.

Pada pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, budaya anti plagiasi merupakan sebuah cermin karakter bangsa yang tinggi, bermoral dan beretika. Masyarakat dengan karakter seperti ini sangat memegang teguh prinsip hidupnya, percaya diri dan tidak akan mengambil yang bukan haknya. Prinsip-prinsip hidup ini akan selalu terlihat pada perilaku mereka sehari-hari dalam segala aspek kehidupan, dimanapun dan dengan siapapun mereka bergaul.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

1. Penguatan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan secara formal, non formal maupun informal sepanjang hayat manusia.
2. Budaya anti plagiasi merupakan budaya yang sangat tinggi, cerminan karakter bangsa yang tangguh, beretika dan bermoral.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penelitian yang kami lakukan, yaitu:

1. Dirjen DIKTI
2. Koordinator KOPERTIS 6
3. Rektor Universitas Pekalongan
4. Ketua LPPM Universitas Pekalongan
5. Dekan Fak. Hukum Universitas Pekalongan

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

6. Rekan –rekan satu tim dalam penelitian ini
7. Para pihak yang telah sangat membantu dan mendukung penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, 2012, *Pengembangan Soft Skill Berbasis Karakter melalui Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar*, makalah Seminar Nasional Tentang Pengembangan Soft Skill Berbasis karakter melalui Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar di IKIP PGRI Madiun
- Sadra Dharmawan, Nyoman, 2014, *Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi*, makalah pada Pembinaan Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan Kopertis Wil. VIII.
- Santoso, W. et.al (2008). *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional*, Jakarta: Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
- Soelistyo, Henry, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suyatno, 2010, *Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa*, Makalah dalam Sarasehan Nasional Pendidikan Karakter di Kopertis Wilayah III
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010, *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*, Jakarta
- Kementerian Perdagangan, 2011, *Informasi Umum MEA*
- Arya Baskoro, *Peluang, Tantangan dan Resiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN*, <http://crmsindonesia.org/node/624>.
- Sejarah Singkat Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, <http://pphp.pertanian.go.id/news/313>
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9599/MEA-2015,-Peluang-Sekaligus-Tantangan>